

# **ALTRUISME SEMU DI SEKOLAH: Analisis terhadap Praktek-praktek Kekerasan dan Keterlibatan *School Stakeholder* dalam Kegiatan Inisiasi Sekolah<sup>1</sup>**

## **Meredian Alam**

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM).

Alamat Email: mere.alam@gmail.com

### **Abstract**

*For over decades in Indonesian public high school, freshmen orientation program in form of school initiation has been perceived as process that leads to altruistic behavior; consisted of solidarity, closely group interaction, deeper understanding on school's living values, and internal norms. However, its implementation is currently raising many protests of educational experts and scholars as well as become a point of vocal in public areas because violent actions are profoundly practiced as ways to infiltrate those altruism and potentially inflict another precedent thought that the activities could be alternative for individual' growth in near future. Accordingly, this research conducted in one of public school in Yogyakarta province attempts to analyze the involvement of school stakeholders throughout the ongoing process in the school initiation and to identify why misleading concept of education remains applied by school' stakeholders. Therefore, the final recommendation of this research is subjected not only to the school stakeholders, but also relevant boards in the government, where the school apparatus should highly involve parents in making decision and implement accountable action in disseminating information pertinent to education process, the relevant board of education in governmental sector should also increase the partnership with local non-governmental organization who has areas of working in the peace and education to seek and design relevant alternative programs for the sake of eradicating violent actions in the school. Local community situated in the school's surroundings should be also actively involved by respective schools for some of community development-related*

---

1 Penelitian ini dilaksanakan di SMA "X" Yogyakarta (nama institusi disamarkan) pada bulan Januari-November 2007, dengan mengangkat studi kasus sebagai pendekatan penelitian.

*activities. The last mentioned recommendation is purposively to have students understand deeper and comprehend thoroughly the use of knowledge that they learn at school for society.*

**Key Words:** school initiation, altruism, dan school stakeholder.

### **Intisari**

*Selama lebih dari puluhan tahun di sekolah menengah umum Indonesia, program orientasi mahasiswa baru di bentuk inisiasi sekolah telah dianggap sebagai proses yang mengarah pada perilaku altruistik; terdiri dari solidaritas, erat interaksi kelompok, pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai hidup sekolah, dan norma-norma internal. Namun, pelaksanaannya saat ini meningkatkan banyak protes dari para ahli pendidikan dan sarjana serta menjadi titik vokal di tempat umum karena tindakan kekerasan yang mendalam dipraktekkan sebagai cara untuk menyusup altruisme mereka dan berpotensi menimbulkan preseden lain berpikir bahwa kegiatan bisa menjadi alternatif untuk 'pertumbuhan individu dalam waktu dekat. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah negeri dalam upaya provinsi Yogyakarta untuk menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan sekolah seluruh proses yang sedang berlangsung dalam inisiasi sekolah dan untuk mengidentifikasi mengapa konsep menyematkan pendidikan tetap diterapkan oleh sekolah 'stakeholder. Oleh karena itu, rekomendasi akhir dari penelitian ini dikenakan tidak hanya kepada para pemangku kepentingan sekolah, tetapi juga papan relevan dalam pemerintahan, di mana aparatus sekolah harus sangat melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan tindakan jawab dalam menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan proses pendidikan, yang relevan dewan pendidikan di sektor pemerintah juga harus meningkatkan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah lokal yang memiliki wilayah kerja di perdamaian dan pendidikan untuk mencari dan desain program alternatif yang relevan demi memberantas aksi kekerasan di sekolah. masyarakat setempat terletak di lingkungan sekolah harus juga aktif terlibat oleh sekolah masing untuk beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat. Rekomendasi disebutkan terakhir adalah purposive memiliki siswa memahami lebih dalam dan memahami thoroughly penggunaan pengetahuan yang mereka pelajari di sekolah bagi masyarakat.*

**Kata Kunci:** Inisiasi sekolah, altruism, dan school stakeholder.

## Pendahuluan

Sekolah menengah atas menjalankan peran mendasar untuk membekali individu agar mampu berpartisipasi aktif dalam lingkungan masyarakat dan lebih dari itu berkapasitas holistik dalam membangun lingkungannya. Refleksi atas pemahaman pendidikan untuk mewujudkan manusia pembangun ini dikemukakan oleh seorang pakar politik pendidikan, Oakeshott<sup>2</sup>, yang memberikan redefinisi komperhensif tentang bagaimana menjadi manusia yang “sebenarnya” melalui pendidikan, bahwa menjadi manusia itu berarti mengenal dirinya dalam hubungan dengan orang lain, bukan sebagai bagian dari organisme yang berkorelasi satu sama lain, juga bukan sebagai anggota suatu masyarakat inklusif, tetapi berpartisipasi dalam beragam hubungan yang dapat dipahami dan merasakan bahasa historis tentang perasaan, sentimen, khayalan, hasrat, pengakuan, kepercayaan moral, kegiatan intelektual dan praktis, kebiasaan, konvensi, dan kedudukan yang menunjukkan kewajiban

Lain halnya dengan Sudarminta (2000)<sup>3</sup>, pendidikan idealnya tidak membatasi aspek intelektualitas saja, tetapi aspek pembelajaran yang holistik pun perlu disentuh. Oleh karena itu, siswa sangat perlu dilatih untuk belajar “untuk berpikir”- (*learning to think*), belajar untuk “melakukan sesuatu demi orang lain di dalam dan di luar komunitasnya”- (*learning to work altruistically*), berkapasitas untuk menghayati kehidupannya menjadi seorang pribadi sebagaimana ia ingin menjadi (*learning to be self*), dan satu hal yang tidak boleh dihiraukan adalah belajar “bagaimana belajar baik dengan kemandirian maupun melibatkan orang lain untuk mendukung sosiabilitanya”- (*learning to ‘learn in self-sustainability*).

## Menuju Pemahaman Altruisme: Disorientasi Tujuan dan Nilai dalam Pendidikan Sekolah Menengah

Tentu peran yang dijalankan pendidikan tersebut melalui institusi sekolah menengah umum mengandung seperangkat nilai yang menghubungkan individu-individu dengan sistem intelektualitas, nilai sosial masyarakat, dan moral. Dalam wilayah ini. Bahkan, Peters (1996)<sup>4</sup> menegaskan konsep pendidikan pada suatu proses yang membedakan

---

2 Joy A Palmer (Ed) (terj. Farid Assifa), 2006. *50 Pemikir Paling Berpengaruh Terhadap Dunia Pendidikan Modern* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), hlm 75.

3 *Ibid.*, hlm 75

4 *ibid.*, hlm 76

antara latihan dan indoktrinasi, sehingga harus memuat tiga kriteria: 1. Bahwa pendidikan merupakan penyampaian atau transmisi sesuatu yang berharga kepada mereka yang terikat dengannya, 2. Pendidikan harus mencakup pengetahuan dan pemahaman serta perspektif kognitif yang tidak lembam, dan 3. Dalam pendidikan setidaknya mengesampingkan sebagian prosedur penyampaian karena tidak memiliki kesadaran dan kerelaan. Kemudian, seperangkat nilai yang dianut oleh semua pihak di sekolah ini diharapkan dapat mendorong pencapaian akademik sebagai target kemenangan dalam berkompetisi dengan institusi lain, menciptakan sikap kooperatif antarpihak yang dilandasi aspek-aspek humanitas dan toleransi satu sama lain serta rasa cinta dan *sense of belonging* individu terhadap institusinya. Oleh karena itulah, pengembangan nilai-nilai moral altruisme agar setiap individu memiliki kedekatan sosial (*social closeness*) sangat diperlukan dalam berbagai situasi di sekolah.

Di lain pihak, E.F Schumacher<sup>5</sup> menekankan bahwa pendidikan mengandung hakekat mendasar dalam berkembangnya nilai-nilai yang bukan hanya sekedar dogma kehidupan, tetapi juga sebagai instrumen yang dipergunakan untuk memandang, menginterpretasi dan menghayati dunia. Sehingga pendidikan yang berguna adalah pendidikan yang menghasilkan kearifan (*wisdom*) terhadap manusia dan elemen kehidupan lain, selanjutnya individu dapat menjalankan fungsinya dalam penyebaran pengetahuan dalam kehidupan. Dispersi pengetahuan adalah hal yang urgen dalam kehidupan karena memiliki pertautan dengan tugas mendasar kehidupan manusia, antara lain: 1. Belajar dari masyarakat dan tradisi dan menemukan kebahagiaannya dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar; 2. Menginternalisasi pengetahuan yang diterima, menyaringnya, menyimpan yang baik dan membuang yang buruk; dan 3. Mematikan diri sendiri dari rasa senang yang berlebihan dan kecenderungan egosentrisme. Menurutnya, apabila individu dapat melampaui tingkatan ini maka ia akan menjadi bebas dan terarah pada Tuhan.

*Pertama*, pandangan Schumacher terhadap pendidikan dan hakekatnya dapat ditarik ke dalam konteks Indonesia sebagai bangsa, bahwa usaha-usaha untuk merefleksikan krisis-krisis nilai di dalam pendidikan nasional sebagai upaya untuk memperbaiki sistem sosialisasi nilai yang kian mengalami degradasi sosial merupakan tindakan yang perlu dikembangkan mengingat perubahan sosial masyarakat berjalan dengan dinamis, dan bergulir sesuai dengan perputaran kontemporeritasnya. Dan dalam konteks ini, pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang

---

<sup>5</sup>Prasetya Tri Wibowo, *Schumacher: Tentang Pendidikan*, (Jakarta: Driyarkara. XVI(1): 3-9), hlm. 3

kemudian diadopsi oleh individu merupakan bangunan sosial yang perlu direkonstruksi, karena pergeseran nilai inipun turut berdampak pada krisis nilai yang dialami oleh institusi pendidikan. Oleh sebab itu, tantangan utama dalam pendidikan masa depan bagi institusi pendidikan di Indonesia adalah merekonstruksi pendidikan nilai yang merupakan suatu aspek integral yang meliputi pembentukan sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Degradasi nilai baik moral dan spiritual yang dialami oleh institusi pendidikan ini lebih lanjut akan membuat orang menjadi lebih pragmatik dan oportunistik. Seiring dengan meluncurnya nilai-nilai ini, nilai material-instrumental yang mengandung substansi manfaat dan ekonomi menjadi utama, yang mengalahkan nilai-nilai altruisme sosial, seperti kemanusiaan, afeksi (kasih sayang), kebenaran, kejujuran, kesetiakawanan, dan penghormatan serta penghargaan terhadap substansi internal komunitas yang ia anut sebagai salah satu fundamen yang melahirkan perbedaan sikap positif antara komunitas yang lain di luar dirinya.

Di sisi yang lain institusi pendidikan mengharapkan tercapainya kesempurnaan individu yang ditunjukkan dengan tumbuhnya sikap dan perilaku individu yang bersesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai altruisme seperti sikap tolong menolong yang dilandasi ketidakpamrihan, perilaku kerjasama dalam komunitasnya yang didasarkan pada norma dan peraturan yang berlaku, rasa cinta dan rasa memiliki terhadap identitas kolektif yang didukung dengan sikap menjaga dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan akademik dan non-akademik yang berlaku, sikap saling menghormati dan menghargai antaranggota di lingkungannya.

Dalam suatu relasi emosi-sosial, Cunningham dalam *American Psychological Society* (2001)<sup>6</sup> menempatkan nilai-nilai altruisme pada sebuah bangunan moral yang terdiri dari perasaan saling percaya (*sense of trust*) dan sikap perhatian kepada individu-individu lain serta perasaan yang dibentuk dari intensitas relasi sosial antarindividu (*sense of concern*). Sedangkan pada tingkat lanjutan, perasaan-perasaan ini dimanifestasikan dalam aktivitas-aktivitas yang dapat memperkuat hubungan antarindividu. Di pihak yang sama, kedekatan emosi antarindividu mendorong mereka untuk menolong satu sama lain, khususnya tatkala anggota lain sangat membutuhkannya.

Berbagai macam penelitian tentang perilaku altruisme menunjukkan bahwa seseorang berkemauan untuk menyediakan pertolongan

---

6 Josephine D Korchmoros & David A Kenny, *Emotional Closeness As A Mediator of The Effect of Genetic Relatedness on Altruism*. (USA: *American Psychological Society*, 2001), hlm. 262.

kepada teman-teman mereka daripada memberikannya pada pihak lain dan kenalan dan bahwa seseorang akan merasa teman-teman di sekelilingnya lebih diwajibkan untuk ditolong daripada orang lain ketika mereka membutuhkan pertolongan. Bahkan, penelitian lainnya kebanyakan menunjukkan bahwa individu sebagai anggota kelompok akan secara sistematis lebih berkemauan untuk bertindak lebih altruistik kepada individu di luar saudaranya bila kedekatan perasaan telah terbangun dengan sempurna :

*Although women's willingness to assist other people increased as genetic relatedness increased among kin, women tended to be more willing to aid friends than kin. Furthermore, individuals were more willing to altruistically toward their spouses than others with whom they shared higher degrees of genetic relatedness<sup>7</sup>*

Kajian terakhir terhadap nilai-nilai altruisme dalam tindakan individu yang dilakukan oleh Korchmoros dan Smith mengindikasikan bahwa individu yang terlibat dalam suatu hubungan dan menghabiskan banyak waktu bersama secara konsekuen akan menjadi interdependen, tumbuh sikap perhatian satu sama lain dan berkemauan untuk lebih bersikap altruistik terhadap individu lainnya. Di ranah yang berbeda melalui penelitian yang dilakukan oleh Krueger<sup>8</sup>, nilai-nilai altruisme dalam kelompok dapat membentengi individu dari sikap antisosial (*anti-social behavior*). Walaupun dalam penelitian tersebut sikap antisosial dimaknai sebagai hal yang mendorong tindak kriminalitas, tetapi bila ditarik dalam relasi kelompok dalam institusi nilai-nilai altruisme yang dibangun di atas fondasi kepercayaan antarindividu (*inter-belief on individuals*) dapat menghasilkan modal sosial yang dapat memenuhi kebutuhan material dan non-material. Dalam tingkatan inilah sekolah sebagai institusi pendidikan semakin kuat dalam melakukan redefinisi nilai untuk menghadapi kebutuhan tersebut yang dialami individu.

Altruisme sebagai suatu nilai merupakan aspek fundamen dalam diri individu sebagai prasyarat untuk bergabung dalam sebuah institusi sosial. Dengan nilai yang dianut setiap individu dapat berbuat sesuai dengan norma-norma dan aturan yang diciptakan di institusi tersebut. Di sekolah misalnya, siswa dituntut menaati seperangkat nilai yang dikontrol oleh norma-norma yang dioperasionalkan oleh aturan-aturan yang ada. Tentu saja, nilai-nilai itupun diharapkan oleh pihak sekolah sebagai aspek yang benar-benar kontributif untuk

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 263

<sup>8</sup> Robert F Krueger., Brian M Hicks., & McGue, Matt, *Altruism and Antisocial Behavior: Independent Tendencies, Unique Personality Correlates, and Distinct Etiologies*. (USA: American Psychological Society, 2001), hlm. 397.



mendukung target pencapaian akademik dan non-akademik.

## Praktek Inisiasi Sekolah di SMA "X" Yogyakarta

Sebagai suatu institusi pendidikan, SMA "X" Yogyakarta setiap tahun menggelar prosesi penyambutan siswa baru melalui kegiatan inisiasi sekolah<sup>9</sup>. Ini merupakan ritual antaragenerasi untuk menanamkan nilai, jiwa, dan sikap yang mendukung pencapaian akademik dan non-akademik sekolah, serta menanamkan rasa tanggung jawab dan pemikiran kritis siswa dalam menghadapi tantangan-tantangan selama mereka menjadi siswa. Di samping itu, salah satu *core value* yang selalu mendapatkan perhatian dari para guru dan pihak sekolah adalah membekali siswa baru dengan sikap-sikap terpuji dan menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong, kerjasama, terbuka satu sama lain, berbakti kepada orangtua, perhatian kepada lingkungan sekitar, dan menghormati antara siswa-guru, dan antara siswa-siswa. Oleh karena itulah, aktor-aktor tersebut berkontribusi besar dalam reproduksi nilai di sekolah.

Relasinya dengan kekerasan, aktor-aktor tersebut berpotensi menerapkan kekerasan kepada objek (individu) dalam waktu yang tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan kesempatan. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah merupakan lembaga sosial yang mudah diamati karena jaringan pelakunya tidak sekompleks layaknya masyarakat. Oleh karena itu, sama halnya seperti masyarakat, sekolah memiliki seperangkat simbol, mekanisme, kepercayaan, dan tata aturan berpikir yang menjadi ciri khasnya. Namun, perlu pola dan posisi struktur agar perangkat ini dapat menjadi bibit yang mematenkan apabila dipegang oleh kelompok dominan yang melegitimasi kekuatannya lewat otoritas, dipertajam dengan kepentingan, dan dilestarikan melalui kekuasaan yang sulit ditumbangkan.

Dari permukaan inisiasi sekolah di SMA "X" Yogyakarta sama seperti sekolah pada umumnya, tetapi sejak lama sekolah ini telah menjadi kekhawatiran publik akibat penerapan kekerasan dalam ritual ini. Dominansi dan keberpihakan guru terhadap kelompok peleton inti rupanya salah satu akar alasan yang menjelaskan mengapa kekerasan di institusi ini sulit untuk didekonstruksi, oleh pihak luar sekalipun. Lebih dari 10 tahun kelompok peleton inti berhasil melegitimasi dominansi eksistensinya melalui pembuatan konsep ritual inisiasi yang diderivasi dari praktek-praktek militerisme dalam pendidikan. Namun, seperti yang dijelaskan di atas bentuk-bentuk ketidakadilan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Rusdy (*bukan nama sebenarnya*) selaku wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, 9 Agustus 2007

kemudian muncul bertahun-tahun dalam wujud perilaku balas dendam (*grudge*), ketidakpuasan terhadap penerapan aturan dan mekanisme penghukuman, serta munculnya friksi sosial antarkelompok. Parahnya, semua bentuk ketidakadilan ini memuncak setiap tahunnya dalam ritual inisiasi. Kuatnya struktur agen yang melibatkan guru, kepala sekolah-wakasek, siswa, dan pihak lain di SMA "X" Yogyakarta ini menciptakan *social linkage* atas tindakan kekerasan tersebut.

Ritual inisiasi adalah bentuk dari *unfair society*. Disebut demikian karena dalam proses ini serangkaian dehumanisasi dalam wujud relasi *oppressed* dan *oppressor* diterapkan oleh antaraktor yang terlibat. *Unfair society* ini selanjutnya ditegakkan melalui kebijakan yang dikeluarkan kepala sekolah walaupun secara *naïve* terjadi pengingkaran pada tingkatan ini. *Unfair society*<sup>10</sup> merupakan formasi awal dari *violent society*. Dari kasus inisiasi ini, kekerasan diinstitusionalisasikan secara perlahan tapi pasti untuk *menciptakan inequitable social order* di sekolah yang dapat dipahami melalui praktek-praktek hukuman restitutif terhadap pelanggar aturan yang mengabaikan keunikan dan potensi kompetitif (*competitive potentials*) serta keberagaman.

Eksplanasi ini cukup representatif untuk mengelaborasi potensi reproduksi kekerasan di sekolah. Lingkaran kekerasan seperti yang terjadi di inisiasi sekolah secara umum menjelaskan tentang komponen potensi kekerasan yang berkelanjutan. Konstruksi korban, kemarahan yang tidak dikendalikan oleh guru disertai dengan intoleransi terhadap perilaku penindasan kepada siswa baru, berkembangnya prasangka dan diskriminasi dan lepasnya tanggung jawab moral guru secara perlahan akibat beban administrasi dalam pengajaran memberikan kontribusi terbesar dalam lingkaran kekerasan di sekolah.

Walaupun banyak fakta tentang tindak kekerasan selama ritual inisiasi di sekolah ini disanggah beberapa guru dan tenaga pendidik dalam bentuk resistensi terhadap publik, tetapi hal ini telah menunjukkan *real social evidence* bahwa eksistensi kekerasan diakui oleh banyak pihak sebagai proses dan metode untuk melanggengkan proses. Bukti-bukti tindak penindasan dengan kata-kata (non-fisik) yang merupakan bagian dari kekerasan berpotensi untuk memposisikan orang lain sebagai korban berkorelasi tinggi dengan kekerasan yang memicu kekerasan lanjutan.

## **Klaim Praktek Kekerasan sebagai Bagian dari Altruisme**

Kegiatan yang bertema pengenalan terhadap siswa baru ini,

---

<sup>10</sup> S Arokiasany, *The Challenge of A Violent Society*, (India: Vidyajoti: Journal of Theological Reflection, 1991), hlm. 352



bertujuan secara umum untuk mendekatkan mereka pada lingkungan sekolah, aktivitas kegiatan belajar-mengajar (KBM), mensosialisasikan peraturan sekolah, dan membentuk karakter siswa baru seperti yang tercantum dalam visi dan misi SMAN "X" Yogyakarta; *disiplin, berpikir dan perilaku kritis, memiliki sensitivitas terhadap pelbagai masalah sosial, dan berkemampuan akademik baik.*

Secara khusus, inisiasi sekolah ini bertujuan untuk memilih anggota baru dalam peleton inti yang berkemampuan dan berkemauan fisik istimewa dan tahan banting. Walaupun demikian, tidak dipungkiri bahwa melalui kegiatan ini pihak sekolah berkeinginan untuk membentuk karakter kolektif siswa sebagai individu yang memiliki *sense of belonging* terhadap sekolah, cinta almamater, rasa dan sikap saling tolong menolong, solidaritas sosial, dan penghargaan terhadap persamaan nasib antarteman.

Untuk mencapai tujuan dan target tersebut seperangkat tugas individu dan kolektif yang dinilai memberatkan siswa baru diaplikasikan. Selain itu, berbagai hukuman fisik dan non-fisik diterapkan kepada siswa baru. Sekolah ini memiliki relasi erat dengan budaya militerisme yang bukti-buktinya masih dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan inisiasi sekolah. Oleh karenanya, pendekatan kekerasan bukanlah suatu hal baru. Kekerasan dalam hal ini telah menjadi kebiasaan yang tergenerasi ke dalam kehidupan sekolah dan terinstitusionalisasi secara masif dalam inisiasi sekolah setiap tahun. Banyak pihak terlibat dalam kegiatan ini, baik guru, kepala sekolah, OSIS, dan kelompok peleton inti.

*Pertama*, panitia yang mengelola kegiatan 95 persen didominasi oleh para anggota peleton inti dan sisanya diisi oleh mereka yang berasal dari ekstrakurikuler lain atau dipilih secara tertutup. Otoritas dalam pembuatan konsep pun diserahkan kepada para petinggi peleton inti. Yang dimaksud oleh petinggi disini adalah ketua peleton inti, sedangkan OSIS hanya berperan sebagai fasilitator. Kemudian, mereka yang menduduki posisi tertentu dalam struktur panitia dipilih secara eksklusif dan elitis. Rekrutmen tertutup ini telah dilaksanakan bertahun-tahun. Di sisi lain, OSIS tidak memiliki kewenangan dalam konseptualisasi kegiatan, terkecuali sebagai pengawas bersama MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas). Dengan demikian otoritas dan dominansi berada di tangan kelompok peleton inti secara umum. Pihak sekolah menarik juga krusial untuk dianalisis karena terlibat dalam proses ini.

*Kedua*, pihak sekolah terdiri dari kepala sekolah atau wakilnya, guru, dan bimbingan konseling. Konsep dan rangkaian acara yang telah dibuat lalu diserahkan ke wakil kepala sekolah urusan kesiswaan

untuk mendapat persetujuan, sedangkan bimbingan konseling berperan konsultatif dengan memberikan “rambu-rambu” hal apa yang diperbolehkan dan dilarang keras, terutama berkaitan dengan hukuman dan penugasan. Ternyata peran mereka “mati” dalam proses ini karena ketika kegiatan berlangsung, hukuman fisik yang membahayakan psikososial siswa/i baru tetap saja diterapkan, berbagai tugas yang mengalienasi siswa/i dari KBM juga dilakukan, pengaduan akibat ketidakterimaan orangtua juga tidak direspon dengan sikap proaktif oleh sekolah. Satu catatan penting dalam penelitian ini, seorang guru bimbingan konseling hanya menganggap tindakan kekerasan ini sebagai “permainan peran atau drama”. Bahkan, beberapa guru yang berhasil diteliti mengklaim bahwa tindakan dehumanisasi yang dilancarkan panitia inisiasi merupakan cara terbaik untuk menstimulasi disiplin diri, rasa saling tolong menolong, solidaritas, rela berkorban, dan cinta terhadap almamater. Dampak negatif jangka panjang yang diakibatkan oleh kekerasan fisik dan non-fisik ini tidak terpikirkan.

Sikap permisif pihak sekolah dalam bentuk kebijakan yang mengizinkan kegiatan inisiasi menandai konstruksi pikir mereka tentang kekerasan masih konvensional. Dalam ranah berpikir mereka, kekerasan dibatasi sebagai suatu tindakan yang menimbulkan luka fisik, mengeluarkan darah, berdampak kematian, cacat tubuh, dan degradasi mental. Hal-hal yang ditimbulkan akibat reproduksi kekerasan dalam jangka panjang seperti sikap arogan, otoritarian, *violent behaviors*, dan lain-lain sama sekali tidak terbesit dalam pemikiran mereka. Alih-alih merekonseptualisasikan inisiasi sekolah dalam bentuk kegiatan yang lebih membangun, pihak sekolah malah menutup diri dari pandangan publik yang selama ini mereka anggap sebagai oposisi karena mencerminkan nama baik sekolah.

Selama lebih kurang 3-5 hari para siswa baru berkewajiban mengikuti kegiatan inisiasi ini. Dan selama itu pula mereka dituntut menyelesaikan tugas-tugas dilengkapi dengan hukuman fisik dan non-fisik yang harus dilalui baik secara kolektif maupun individu. Ruang eksekusi untuk menghukum mereka yang dianggap melakukan kesalahan fatal pun “disediakan” oleh panitia dan para eksekutor berwajah garang siap menyiksa. Sebagian besar tugas yang wajib dikerjakan itu mengalienasi siswa dari KBM. Alhasil, sebagian besar diantara mereka tidak berkonsentrasi selama pelajaran. Akibat bayangan hukuman yang harus dilalui setiap hari, tugas-tugas yang memberatkan, pengawasan panitia selama kegiatan dan jam istirahat sekolah yang memunculkan perasaan terancam (*threatened*), takut, dan

tertekan, mereka terdorong mencari penyelesaian masalah dengan bekerja dalam kelompok. Selama proses inilah, tumbuh sikap tolong-menolong, rela berkorban, kesadaran moral dalam kelompok, disiplin karena komitmen bersama, dan cinta institusi.

Namun demikian, nilai-nilai demikian ini muncul bukan karena kesadaran diri, tetapi karena tekanan situasi yang dimekanisasi melalui hukuman, tugas, dan tindakan kekerasan lainnya selama inisiasi berlangsung. Bila dianalisis keterlibatan sekolah dalam pengawasan ini merupakan bagian dari kegagalan fungsi pendidikan yang dijalankan oleh sekolah. Menurut Ignas Kleden ada 2 (dua) fungsi pendidikan yang harus dilaksanakan sekolah. *Pertama*, sekolah bertugas tidak hanya mereproduksi keadaan masyarakat dalam bentuk yang disederhanakan, tetapi juga dalam bentuk yang dimurnikan. Ini berarti sifat-sifat dan kecenderungan negatif dan destruktif dalam masyarakat harus mampu dinetralkan oleh sekolah. Sekolah tidak dimaksudkan untuk mentransmisikan segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, tetapi memilih nilai-nilai yang dianggap mendukung perkembangan masyarakat ke arah lebih baik. *Kedua*, sekolah bertugas menciptakan perimbangan antara unsur dalam lingkungan sosial dan mengusahakan agar seorang peserta didik dapat keluar dari keterbatasan lingkungan sosial dimana dia sudah dilahirkan. Dalam fungsi ini, sekolah bertindak sebagai *agent of change* dalam mendemokratisan masyarakatnya.

Mekanisme kontrol pun kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam otoritas ini dan tentu saja dengan berbagai cara agar kelompok superordinat dapat dengan mudah melegitimasi kepentingan-kepentingannya. Bentuk hubungan antara OSIS dan kelompok peleton inti di SMA "X" Yogyakarta dalam menerapkan inisiasi sekolah dipahami dalam konteks dominan dan inferior. Terbentuknya relasi dominansi ini tidak terlepas dari peran kekuasaan (*power*) peleton inti dalam sistem keorganisasian di sekolah ini. Salah satu bentuk kekuasaan yang paling utama adalah *coercive power*.

*Coercive power* sangat dekat dengan kekerasan karena kekuasaan ini mendasari munculnya ketakutan sebagai dampak negatif yang mungkin terjadi<sup>11</sup>. Kekuasaan ini dapat dikonstruksi melalui sanksi fisik, penggunaan ancaman, dan pengendalian masa menggunakan mekanisme tekanan. Bahkan, represi yang diterapkan untuk mengendalikan sistem tidak lagi dipandang sebagai hal yang negatif. Buruknya, kekerasan di dalam suatu sistem dominansi tidak dipandang sebagai suatu aspek amoral yang melahirkan lingkaran kekerasan,

<sup>11</sup> Stephen P Robbins, *Organizational Behavior*. (USA: Prentice Hall, 2003), hlm. 367.

tetapi menandai batasan-batasan sistem sosial yang dianut institusi tersebut dengan institusi lain. Walaupun demikian, ini menunjukkan bahwa setiap kelompok yang menjalankan *coercive power* jelas memiliki pengalaman-pengalaman sosial untuk mendominasi dan inilah yang mencirikan eksistensi kelompok penindas. Freire dengan komperhensif mengelaborasi bahwa kesadaran-kesadaran kelompok penindas cenderung mentransformasi segala hal di sekelilingnya menjadi objek dominasinya<sup>12</sup>.

Perilaku sadis melalui penerapan kekerasan adalah kecenderungan yang dimiliki oleh kelompok dominan. Semakin kuat kontrol kelompok penindas, maka akan semakin intensif tindakan mereka untuk mengubah kelompok yang ditindas menjadi objek tidak bergerak dengan kemampuannya. Sejalan dengan hal ini, Herald (1994) menegaskan<sup>13</sup>:

*Bullying is [a] long standing violence, physical or psychological, conducted by an individual or a group and directed against an individual who is not able to defend himself in the actual situation with a conscious desire to hurt, threaten or frighten that individual or put them under stress*

Dari penjelasan ini, *bullying* merupakan suatu bentuk kekerasan baik fisik maupun individu yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu terhadap individu lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi nyata dengan kesadaran. Lebih lanjut, ancaman dan ketakutan yang dilancarkan kepada individu lain pun dapat dikelompokkan sebagai *bullying*. Situasi mekanis yang menekan individu dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai *bullying*. Reaksi kelompok atau individu dalam situasi tertentu merupakan penekanan konsep atas *bullying*. Maka, apapun bentuk dehumanisasi baik dengan perkataan dan perbuatan sejauh menghasilkan situasi demikian merupakan kekerasan yang meniadakan otonomi individu dan nilai rasa kemanusiaan. Selanjutnya, lebih dari itu, *bullying* dapat menjelma sebagai suatu pengisolasian terhadap individu lain yang tidak memiliki perimbangan kekuatan dengan kelompok penindas<sup>14</sup>.

## **Matinya Peran *School Stakeholders* sebagai Pengontrol Moral**

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dimainkan oleh pihak

---

12 Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*. (USA: Continuum, 2007), hlm. 58.

13 David A Thomson., Tiny Arora., & Sonia Sharp, *BULLYING: Effective Strategies for Long Term Improvement*, (London: Routledge), hlm. 177.

14 Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. (London: Blackwell Publishing, 1993), hlm. 167.

sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, bimbingan konseling, dan sekelompok individu lain yang terlibat dalam pengaturan administrasi. Di dalam keluarga pembelajaran dan pengajaran moral dijalankan oleh orang tua, sedangkan di sekolah peran ini dimainkan oleh kepala sekolah bersama guru dan bimbingan konseling. Kepala sekolah memegang kendali seluruh kegiatan pembelajaran, para guru bertanggungjawab atas pelaksanaan pembelajaran dan para pegawai administrasi melayani penyediaan semua fasilitas yang diperlukan. Dari pemaparan ini jelas bahwa guru, kepala sekolah, dan bimbingan konseling menempati posisi strategis di sekolah sebagai penanggung jawab rangkaian interaksi antarsiswa, siswa antar guru dan *vice versa* sesuai dengan paradigma pendidikan yang ada yaitu pembimbingan berkelanjutan (*to edu-care*). Lebih dari itu, konstruksi pihak sekolah terhadap submasalah moral sangat menentukan bagaimana proses regenerasi perilaku dan tindakan sosial di dalamnya. Demikian pula terhadap kekerasan.

Menurut kepala SMAN "X" Yogyakarta kekerasan yang selama ini diimplementasikan dalam inisiasi sekolah adalah kedisiplinan yang harus diterapkan kepada siswa baru<sup>15</sup>. Salah satu sifat positif dari inisiasi sekolah ini dapat menjadikan para siswa baru memiliki mental konstruktif dan kritis. Akibatnya, pada penyelenggaraan inisiasi sekolah setiap tahunnya kepala sekolah tidak pernah mengubah kebijakan terhadap hal ini. Kalapun ada, hanya sebatas pada usulan konsep yang disarankan kepada panitia. Kebijakan lain dalam bentuk pelarangan tidak pernah dilaksanakan. Dari sisi panitia sendiri, hal ini juga mendorong imitasi konsep yang sama antargenerasi. Keterbukaan kepala sekolah untuk memikirkan efek jangka panjang tidak pernah dilakukan. Konstruksi kognitif ini senada dengan guru dan bimbingan konseling.

Tindakan kekerasan melalui hukuman dalam inisiasi sekolah adalah tradisi yang harus dipertahankan karena memuat nilai solidaritas antar dan intergenerasi di SMAN "X" Yogyakarta. Inilah konstruksi kekerasan dalam benak guru dan bimbingan konseling yang di satu sisi menyebabkan fungsi mereka sebagai *cura personalis* mengalami kegagalan. Sebagai bagian dari sistem, idealnya guru dan bimbingan konseling berkontribusi dalam pembuatan aturan tentang kegiatan yang dilakukan siswa untuk sebagai bentuk kontrol perilaku. Tetapi, hal ini tidak pernah dijamah oleh mereka. Maka, kegagalan ini tidak menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap terbentuknya nilai-nilai altruisme yang berjangka panjang. Bahkan, pembentakan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Narto (bukan nama yang sebenarnya), 10 Agustus 2007

terhadap siswa baru selama inisiasi ini semakin masif. Selain itu, berpangkal dari pemikiran Erich Fromm tentang "ketakutan" sebagai akar dari kekerasan, dapat dikatakan disini bahwa akar kekerasan dalam pendidikan ialah ketakutan yang muncul dalam diri seorang pendidik ketika secara eksistensial berhadapan dengan anak didiknya<sup>16</sup>. *Pertama*, ada sebuah ketakutan akan perubahan sistem nilai yang telah lestari. *Kedua*, ketakutan akan tergoyahkannya apa yang disebut sebagai hegemoni kewibawaan guru sebagai pengejawantahan masyarakat "dewasa". Konstruksi pikiran yang demikian membuat kondisi psikososial pendidikan Indonesia penuh dengan nuansa kekerasan.

Macdonald<sup>17</sup> mengelaborasi bahwa dalam pandangan kontinuitas sosial guru berfungsi penting untuk menyajikan dan mewujudkan model aksi sosial demi pergerakan dalam masyarakat. Salah satu kapasitas yang harus dimiliki oleh guru adalah keberanian dalam perlawanan terhadap perubahan sosial. Lebih lanjut, apabila guru menjalankan kapasitas ini pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa akan mencapai keberhasilan dan stabilitas sosial karena ia merupakan sumber daya penggerak untuk mewujudkan peserta didik yang kritis, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Parahnya, kekerasan sejak lama telah merasuk dan melebur dalam kesatuan sistem sosial di sekolah dan menjadi prioritas pemulihan moral restitutif. "*The teacher disciplines and the students are disciplined*"-demikian kata Freire menanggapi sikap guru yang bertindak sebagai aktor pendisiplin, sementara siswa hanya dilibatkan sebagai objek mati. Tidak mengherankan apabila konsep pendisiplinan yang demikian ini menganggap siswa di sekolah sebagai individu yang dapat "dibentuk" kesadaran moralnya<sup>18</sup>.

Kesadaran moral ini kemudian terstruktur. Akibatnya, setiap elemen baik guru dan kepala sekolah bersikap permisif terhadap hal ini. Parahnya, dampak buruk munculnya banalitas perilaku peserta didik di masa depan dari penerapan model disiplin kadafer ini tidak dipikirkan lebih lanjut.

## Penutup

Dari penelitian ini kita dapat memahami bahwa praktek-praktek kekerasan di sekolah menengah atas distrukturisasi melalui

---

16 Fromm Erich, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-psikologis Atas Watak Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 219

17 Norman M Goble, *Perubahan Peran Guru*. (Jakarta: Gunung Agung, 1993), hlm. 52.

18 Freire, Paulo. 2007. *Pedagogy of the Oppressed*. (USA: Continuum, 2007), hlm. 73



suatu kelemahan kontrol antara guru, bimbingan konseling, dan kepala sekolah. Paradigma berpikir para aparatus sekolah bahwa kekerasan yang diterapkan selama kegiatan inisiasi berimplikasi pada pertumbuhan positif mental peserta didik justru mempertinggi potensi lahirnya bentuk-bentuk kekerasan baru. Sebagai bagian dari entitas sosial yang minor setelah keluarga, sekolah di lain pihak, dapat menjadi ranah baru untuk terbentuknya *violent society*.

Kajian mendalam perlu dilakukan untuk memutus rantai kekerasan di semua tingkatan pendidikan, bahkan urgensi-nya pun perlu menyentuh ke level struktur institusi. Pendidikan guru di perguruan tinggi misalnya, perlu ada proses rekonstruksi kurikulum yang menekankan bahwa terbentuknya kemampuan inovasi pengajaran yang menempatkan proses evaluasi perkembangan peserta didik sebagai indikator keberhasilan pembelajaran.

Dari uraian di atas beberapa rekomendasi yang bisa diaplikasikan untuk mengeliminir tindak kekerasan dalam inisiasi sekolah adalah sebagai berikut:

1. Membuat satu badan kolektif yang terdiri dari beberapa sekolah di satu wilayah kotamadya atau kabupaten untuk mengontrol pelaksanaan program inisiasi sekolah. Selain itu bertindak melaksanakan proses intervensi dan investigatif untuk mencegah kemungkinan buruk dan munculnya kasus-kasus preseden dalam kegiatan ini.
2. Bagi sekolah yang terkait, merancang alternatif kegiatan yang berfungsi untuk pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru yang lebih damai dan lebih aktif melibatkan mereka ke dalam aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh komunitas setempat, sehingga dapat menangkap proses kebermaknaan hidup yang mampu diintegrasikan ke dalam pembelajaran mata pelajaran terkait.
3. Dinas pendidikan terkait hendaknya menjalankan fungsinya sebagai pengontrol secara keseluruhan aktivitas-aktivitas orientasi siswa baru dengan menerjunkan personalia mereka ke lapangan dan memantau serta mengevaluasi perkembangan serta dampaknya bersama guru dan orang tua.
4. Dinas terkait bersama lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pendidikan perdamaian berkolaborasi untuk menggelar workshop mengenai alternatif program dan kegiatan yang efektif dilaksanakan untuk orientasi siswa baru di sekolah masing-masing.

5. Sekolah terkait lebih melibatkan orang tua dan wali kedalam aktivitas-aktivitas evaluatif secara berkala untuk mendapatkan feedback positif mengenai proses perkembangan anak didik dan alternatif pemecahan masalah.

## Daftar Pustaka

- Freire, Paulo. 2007. *Pedagogy of the Oppressed*. USA: Continuum.
- Erich, Fromm. 2000. *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-psikologis Atas Watak Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Goble, Norman M. 1983. *Perubahan Peran Guru*. Jakarta: Gunung Agung.
- Megawangi, Ratna. 2004. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Palmer, Joy A (Ed) (terj. Farid Assifa). 2006. *50 Pemikir Paling Berpengaruh Terhadap Dunia Pendidikan Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Organizational Behavior*. USA: Prentice Hall.
- Olweus, Dan. 1993. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. London: Blackwell Publishing.
- Thomson, David A., Arora, Tiny., & Sharp, Sonia. 2002. *BULLYING: Effective Strategies for Long Term Improvement*. London: Routledge.

## Jurnal

- Arokiasany, S. 1991. The Challenge of A Violent Society. *Vidyajoti: Journal of Theological Reflection*. 55: 352-353.
- Korchmoros, Josephine D & Kenny, David A. 2001. Emotional Closeness As A Mediator of The Effect of Genetic Relatedness on Altruism. *American Psychological Society*. 12(3): 262-265.
- Krueger, Robert F., Hicks, Brian M., & McGue, Matt. 2001. Altruism and Antisocial Behavior: Independent Tendencies, Unique Personality Correlates, and Distinct Etiologies. *American Psychological Society*. 12(5): 397-402.
- Wibowo, Prasetya Tri. 1990. Schumacher: Tentang Pendidikan. *Driyarkara*. XVI(1): 3-9.